

Peran Dinas Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan

Oleh:

¹Nur Jalal, ²Syahruddin,³Erwin Nugraha Purnama

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke

Email: nurjalal242@gmail.com,

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan peran Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan teknik analisa data menggunakan tiga tahap: Reduksi data, Penyajian data, dan upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di lampu satu kelurahan samkai masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini berdampak pada keberdayaan masyarakat nelayan dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Dari beberapa indikator penelitian yang digunakan , dari segi sumber daya tenaga kerja, masih kurang memilih pengetahuan dan keterampilan penggunaan dan perbaikan alat tangkap ikan, disebabkan kurang maksimalnya pembinaan dari dinas juga kurang responsifnya masyarakat nelayan. Kurangnya permodalan para masyarakat nelayan, juga bantuan modal usaha dari dinas masih terbatas belum mampu meningkat secara signifikan. Sarana dan teknik penangkapan ikan yang masih sederhana masih banyak menggunakan alat atau perahu terdisional untuk menangkap ikan, juga bantuan peralatan dari dinas belum sepenuhnya bisa memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan akibat terbatasnya anggaran pemerintah . Ternik pengelolaan dan manajemen pemasaran dan keuangan yang dimiliki masyarakat nelayan dalam rangka meningkatkan pendapatannya masih kurang, juga dari segi peningkatan keterampilan dari dinas belum intensif dan tidak berkelanjutan.

Kata kunci : Peran Dinas; Pendapatan Masyarakat Nelayan

Abstract

The purpose of the study was to describe the role of the Fisheries Service of Merauke Regency in Increasing the Income of Fishermen, Samkai Village, Merauke Regency. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, while the data analysis technique uses three stages: data reduction, data presentation, and efforts to draw conclusions or verification. The results of this study indicate that the role of the Merauke District Fisheries Service in increasing the income of the fishing community in Lampu one, Samkai sub-district, has not been implemented properly. This has an impact on the empowerment of fishing communities in order to increase their income. From several research indicators used, in terms of labor resources, there is still a lack of knowledge and skills in the use and repair of fishing gear, due to the lack of maximum guidance from the service and the lack of responsiveness of the fishing community. The lack of capital for the fishing communities, as well as limited business capital assistance from the agency, have not been able to increase significantly. Fish catching facilities and techniques are still simple, many use tools or traditional boats to catch fish, also equipment assistance from the service has not been able to fully provide assistance to fishing communities due to the limited government budget. The marketing and financial management and management techniques owned by fishing communities in order to increase their income are still lacking, also in terms of increasing skills from the service, it is not intensive and unsustainable.

Keywords: The Role of the Service; Fisherman Community Income

PENDAHULUAN

Keadaan Masyarakat Kelurahan Samkai yang sekarang merupakan salah satu Kelurahan tertua dari delapan (8) Kelurahan yang berada di wilayah pemerintahan Distrik Merauke tepatnya dipinggiran Laut Arafura, Konon ceritanya Kelurahan Samkai sebelum tahun 1981 merupakan Kampung Samkai dengan Kepala kampungnya bernama Yohanis Tapro Ndiken. Berdasarkan aspek luas wilayah dan letak Kelurahan Samkai yang berada diwilayah Kota Merauke, maka pada tahun 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Kelurahan Samkai ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan dengan Nama Kelurahan Samkai nama Samkai sendiri mempunyai arti “jalan benar” yang diambil dari bahasa Suku Marind Buti yang bertempat tinggal di Kelurahan Samkai. Suku Marind Buti adalah suku yang memiliki hak ulayat tanah yang sekarang menjadi areal pusat pemerintahan Kabupaten Merauke.

Menurut (Soekanto, 2010), Peran (*role*) merupakan proses dinamis dari suatu kedudukan atau status, yang artinya apabila seseorang sedang melakukan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya berarti dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antar kedudukan dan peranan tidak bisa dipisahkan karena keduannya saling bergantungan satu sama lain peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang untuk kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam organisasi masyarakat.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pemerintah mempunyai 3 fungsi yaitu diantaranya: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota serta mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk mencapai kemajuan bersama. Pelaksanaan pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya ke masyarakat adalah melalui pemberdayaan. Karena dengan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat

Sejak tahun 1990 pemerintah daerah melalui Dinas setempat telah menyalurkan bantuan perahu dan motor kepada sebagian masyarakat nelayan adat, namun bantuan tersebut tidak digunakan dan dijual kepada masyarakat pendatang. Jumlah penduduk Kelurahan Samkai tahun 2015 tercatat 8.514 jiwa dengan komposisi laki-laki 4.431 jiwa dan perempuan

4.083 jiwa. Secara umum Kelurahan Samkai didominasi oleh penduduk usia (15-56 tahun) dengan jumlah persentase 84%. Sedangkan kelompok usia (0-12 bulan) dengan jumlah persentase 2% dan usia tua (> 56 tahun) mempunyai proporsi yang sangat kecil (5%). Hal ini mengindikasikan tingkat kematian bayi dan orang tua yang masih cukup tinggi di kabupaten Merauke dan tingginya pendatang di Kelurahan Samkai dengan usia produktif kerja. Dari keseluruhan jumlah 6.390 jiwa yang terdata pada tahun 2015, pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 12%, Kristen katolik 28% dan Islam 60%. Daerah Lampu satu, Binaloka dan Kampung Tengah mayoritas pemeluk agama Islam yang berasal dari Sulawesi, Jawa dan Sumatera, sebaliknya daerah Imbuti mayoritas beragama Kristen Katolik yang merupakan penduduk asli Marind. (Arifin et al., 2015)

Sudah menjadi tugas Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan sumber daya perikanan terbilang sangat banyak baik dari segi kuantitasnya maupun beraneka ragam jenisnya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam pasal 1 bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakatnya. Dalam lingkup masyarakat pesisir kegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut. Kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai mata pencahariannya sebagai nelayan yang mengantungkan hidupnya dari sektor perikanan.

Dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang- Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 3 dinyatakan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: a). Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, b). Meningkatkan penerimaan devisa negara, c). Mendorong perluasan dan kesempatan kerja,d).Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, e).Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan,f). Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, g). Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengelolaan ikan, h). Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan,

dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, i). Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

Potensi Maritim diwilayah Kabupaten Merauke luar biasa. Bahkan, khusus untuk produksi ikan yang terdaftar resmi di Dinas Perikanan itu mencapai 81.000 ton per tahun. Jumlah tersebut, belum termasuk ikan-ikan hasil tangkapan nelayan yang langsung dijual ke pedagang dan hasil tangkapan kapal di atas 30 GT yang ijinnya di keluarkan oleh pusat.

Pemerintah daerah juga akan membentuk BUMD untuk mendapatkan PAD. Ini supaya sumber kekayaan di Merauke, bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Merauke. Jika melihat potensi maritim yang kita miliki memang luar biasa. Kekayaan alam di laut kalau dioptimalkan dengan baik, dikelola dengan baik maka tidak perlu lagi pusing dengan kekayaan lain. Bahkan, ini bisa memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Masyarakat Nelayan diberbagai kawasan padaumumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) karena sebagian besar penduduknya hanya lulus sekolah dasar atau belum tamat sekolah dasar, dan lemahnya fungsi dari keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat.

Nelayan dan Komunitas Desa Pesisir, pada umumnya adalah bagian dari kelompok masyarakat miskin yang berada pada level paling bawah dan seringkali menjadi korban pertama yang paling menderita akibat ketidakberdayaan dan kerentanannya. Bagi nelayan tradisional, musim hujan yang panjang dan angin utara bukan saja sama dengan memperlama masa kesulitan mereka dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan mereka makin miskin, dan mereka terpaksa masuk dalam perangkap hutan yang tidak berkesudahan. Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, selain dipengaruhi sejumlah kelemahan internal, juga karena faktor eksternal. Keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih moderen dan tidak dimiliki oleh modal yang cukup adalah faktor-faktor internal yang sering kali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan para nelayan tradisional. Masyarakat nelayan memiliki karakteristik hidup yang beda karena pola kehidupannya yang terbentuk dari kehidupan di lautan yang tidak pernah dihadapi oleh masyarakat lain dimana mempunyai resiko yang besar, terutama resiko yang berasal dari faktor alam untuk itu perlu startegi khusus untuk bekerjanya. Rahim, A (Sriyono et al., 2021) Selain faktor alam fasilitas yang dimiliki oleh para nelayan yang sangat minim yang menyebabkan kesulitan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan. Kondisi seperti ini yang mengakibatkan nelayan menjadi kurang sejahtera Kusnadi (Sriyono et

al., 2021), oleh karena itu kondisi dari kesejahteraan nelayan tergantung dari kondisi pesisir tersebut Limi, Sugiarto (Sriyono et al., 2021)

Di lain pihak, ada sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan dihadapan tengkulak, keadaan infrastuktur pelabuhan perikanan, dan yurisdikasi daerah otonomi adalah beban tambahan yang makin memperparah keadaan. Tanggungjawab Pemerintahan di daerah dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin kompleks, dimana selain bertanggungjawab memberikan pelayanan dan pembangunan, pemerintah daerah juga harus aktif untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kusnadi (Ramdayanti et al., 2021) mengatakan bahwa ada beberapa indikator kualitatif yang menandai suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan, yaitu: a.Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi: individu, rumah tangga dan masyarakat yang ditandai dengan hal-hal sebagai berikut ini: a)Kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat.b).Nilai tabungan dan investasi bertambah. c).Kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, optimal, dan berkelanjutan. d)Kondisi kualitas sumber daya manusia (SDM) berkembang baik. b.Kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil-kontinuitas. c.Kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrument pembangunan lokal. d.Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi: informasi, kapital pasar, dan teknologi. c.Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan di kawasan pesisir dan tumbuhnya kesadaran kritis warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir. d.Kawasan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang secara mandiri dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya.Oleh sebab itu, pemberdayaan yang dilaksanakan perlu diarahkan dengan memperhatikan segala aspek kehidupan terutama perekonomian rakyat, terutama yang berada di daerah, meliputi wilayah kecamatan maupun pedesaan. Pada penilian sebelumnya bagaimana peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayang di desa Ciparagejaya kabupaten Karawan, bahwa salah satu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan menggunakan teori peran pemerintah dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh Arif (Ramdayanti et al., 2021) Pemerintah sebagai **regulator** yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan_peraturan.

Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Karawang mengacu pada peraturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam dan Perutran Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Pemerintah Kabupaten Merauke utamanya Dinas Perikanan harus mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan saat ini. Terutama harus ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan nelayan mengingat ikan merupakan salah satu penyumbang APBD di Kabupaten Karawang. peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berpihak kepada masyarakat. Namun pada saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke terkait pemberdayaan nelayan.

Peran pemerintah sebagai **dinamisator** adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan nelayan, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Perikanan memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan berupa meningkatkan kualitas nelayan. Ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan yakni, perundang-undangan, kelembagaan nelayan, pemberian alat tangkap, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pembinaan ini dilakukan hanya kepada kelompok-kelompok nelayan misalnya seperti kelompok usaha bersama, anggota koperasi, atau nelayan pemilik kapal dan nelayan tanpa kapal. Dengan adanya pembinaan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karawang bisa meningkatkan perekonomian nelayan dan juga meningkatkan pendapatan daerah.

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permudalan

Untuk menjamin keselamatan masyarakat nelayan dalam mencari hasil tangkap, maka kapal harus dinyatakan layak digunakan jika ingin berlayar. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan para nelayan dalam berlayar untuk menangkap ikan adalah perlu diadakannya pelatihan. Pelatihan ini merupakan

bentuk strategi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat nelayan. Dalam meningkatkan SDM nelayan pemerintah berusaha untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, Dinas Perikanan Kabupaten Merauke setiap tahunnya mengadakan diklat sebagai bentuk bimbingan secara teknis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk untuk meningkatkan keterampilan dan untuk teknis secara pengelolaan pembuatan kapal dan perbaikan mesin kapal

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan Untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan perlu ditopang oleh berbagai hal diantaranya keamanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu wilayah, harus melaksanakan pemberdayaan ke setiap daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah memberikan persediaan sarana dan prasarana, dan juga persediaan modal untuk proses pembangunan. Pemerintah Kabupaten Merauke sudah memberikan bantuan sarana dan prasarana, selain itu juga ada bantuan premi asuransi kepada nelayan. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah optimal. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, yang dimana nelayan sebagian besar ekonominya masih rendah.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pada umumnya masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan kurang memadai dalam melakukan aktifitasnya akibat terbatasnya modal usaha maupun teknologi yang dimiliki, seperti sampan dan kapal motor dan peralatan penangkapan ikan seperti pancing, jaring dan sebagainya, masih kurang memadai baik dari jumlahnya maupun kondisi peralatannya. Bantuan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan berupa sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan tangkap seperti perahu, kapal motor dan peralatan penangkapan ikan antara lain jaring, pancing, masih mencapai sebagian kecil nelayan yang ada. Rendahnya pengetahuan pengelolaan sumber daya perikanan, keberadaan kehidupan nelayan selama ini dihadapkan dengan sejumlah permasalahan yang terus membelitnya seperti lemahnya manajemen usaha, rendahnya adopsi teknologi dan kesulitan modal usaha mengakibatkan kehidupan nelayan dalam realitasnya menunjukkan kemiskinan. Agar kehidupan ekonomi nelayan meningkat maka perlu dibantu peningkatan akses masyarakat terhadap kelembagaan ekonomi, mengoptimalkan kelembagaan

masyarakat ke dalam setiap program Pemerintah, mengintegrasikan kelembagaan informal dengan kelembagaan formal. (Rostin, 2016)

Di pantai Lampu Satu Kabupaten Merauke selama ini program sudah berjalan namun belum berjalan optimal. Saat ini kebijakan yang diharapkan adalah sosialisasi bukan sekedar pemberian bantuan. Para Nelayan saat ini baru diberikan pelatihan serta sosialisasi mengenai bantuan-bantuan yang mereka dapatkan agar mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Hanya saja hingga saat ini setiap kebijakan tersebut belum membawa hasil yang signifikan terbukti pendapatan nelayan belum maksimal karena masih ada dari nelayan yang hidup dalam kesulitan. Dengan demikian peran Dinas Perikanan sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi akses informasi teknologi, modal dan pemasaran hasil tangkapan ikan bagi para nelayan di daerah tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, penelitian yang bertujuan memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari apa adanya, bukan dunia yang seharusnya, maka seorang peneliti kualitatif haruslah orang yang memiliki sifat open minded. Karena melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial. Informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (semi structure interview). Tujuan wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam penelitian ini, teknik analisis data adalah sebagai berikut: menulis pengamatan hasil wawancara dan hasil studi dokumentasi, mengklasifikasikannya dan kemudian menyajikannya. Kemudian data yang dianalisis diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan secara kualitatif dan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. (Sugiyono, 2016). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil pengamatan dan hasil wawancara dari informan kunci ataupun penunjang dan data sekunder yang diperoleh dari bahan lain guna melengkapi data seperti, dokumen, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kelurahan Samkai merupakan daerah strategis karena merupakan pusat pendaratan ikan nelayan tradisional dengan kapasitas muatan 3- 30 GT dengan komoditas ikan laut. Selain keberadaan sarana dan prasarana pendukung desa, kelebihan Kelurahan Samkai adalah kelompok masyarakat keluarga nelayan yang mampu memanfaatkan ikan sebagai bahan produksi makanan sehat dan higienis.

Setelah era kemerdekaan, Samkai merupakan daerah pesisir pantai yang dimanfaatkan oleh masyarakat adat Marind sebagai tempat tinggal dan mencari ikan. Sejak tahun 1960 terjadi gelombang pendatang di Kelurahan Samkai dari masyarakat nelayan Sulawesi, hal ini membuktikan potensi perikanan perairan laut Kelurahan Samkai sangat tinggi. Bagi nelayan masyarakat adat Marind, proses penangkapan ikan tanpa menggunakan perahu, sehingga penangkapan dilakukan disekitar pesisir pantai. Sedangkan bagi masyarakat nelayan pendatang proses penangkapan ikan telah menggunakan perahu buatan sendiri, sehingga jarak penangkapan lebih luas dan hasil tangkapan lebih banyak. Hal ini dapat terjadi dikarenakan keterbatasan tingkat pendidikan masyarakat dan terbatasnya lapangan pekerjaan serta persaingan hidup yang semakin ketat sehingga dibutuhkan keterampilan dan keahlian khusus agar dapat bersaing hidup. Dengan sumberdaya alam yang melimpah maka dibutuhkan tenaga kerja yang banyak dan berkualitas yang mempunyai keterampilan dalam pengelolaan perikanan, namun hal ini masyarakat nelayan dikelurahan samkai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Sejak tahun 1990 pemerintah daerah melalui Dinas setempat telah menyalurkan bantuan perahu dan motor kepada sebagian masyarakat nelayan adat, namun bantuan tersebut tidak digunakan dan dijual kepada masyarakat pendatang.. Dari hasil penelitian dalam rangka memberikan sentuhan agar para nelayan tingkat pendapatannya bisa meningkat dengan memberikan permodalan berupa bantuan modal usaha baik dari dinas maupun instansi dan lembaga terkait belum cukup membantu masyarakat nelayan samkai.

Dinas Perikanan sebagai instansi yang melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengembangan hasil produksi perikanan yang ada di Kabupaten Merauke harus memperhatikan hal-hal untuk menunjang serta membantu masyarakat yang ada terlebih bagi masyarakat nelayan. Sebelum adanya program yang di berikan Dinas Perikanan melalui pemberdayaan masyarakat seperti sumber daya manusia yang tidak kompeten, bahan penangkapan nelayan yang kurang memadai serta kurangnya sosialisasi cara penangkapan ikan yang benar. Setelah adanya program dari Dinas Perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan dengan memberikan fasilitas peralatan kepada para nelayan, pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pelatihan, pengolahan dan

pengawetan ikan, serta pembentukan komunitas nelayan. Untuk mengetahui itu semua usaha dari perikanan tangkap melalui produktivitas tenaga kerja yang di miliki, modal usaha yang ada, pengetahuan tentang teknologi oleh masyarakat nelayan, pembinaan dan pelatihan yang di berikan, dan pemasaran dari hasil nelayan. Pada dasarnya masyarakat nelayan Samkai dalam hal teknik penangkapan ikan belum memadai hal ini, karena masyarakat nelayan masih banyak yang menggunakan alat penangkapan ikan tradisional, seperti perahu dan alat penangkap ikan yang kompensional

Produktivitas kerja merupakan petunjuk mengenai beberapa unit atau nilai produksi yang dapat dihasilkan oleh satu orang pekerja selama satu periode tertentu. Petunjuk itu dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang atau sekelompok pekerja baik dalam satu tahapan produksi maupun keseluruhan proses produksi. Ukuran yang dapat menunjukkan produktivitas di antaranya dapat dilakukan dengan perbandingan (rasio), antara nilai output industri dengan inputnya. Semakin tinggi nilai rasio tersebut menunjukkan semakin tinggi produktivitas pekerja pada industri tersebut. Tenaga kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam produksi, karena tenaga kerja merupakan faktor penggerak faktor input yang lain, tanpa adanya tenaga kerja maka faktor produksi lain tidak akan berarti. Pada tahap ini membutuhkan banyak pekerja sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan dari usaha nelayan tersebut.

Inti dasar dari suatu perusahaan / Bidang usaha agar dapat terus menjalankan kegiatan usahanya adalah dengan adanya modal usaha. Modal merupakan salah satu faktor terpenting dari kegiatan produksi. Bagi perusahaan yang baru berdiri atau mulai menjalankan usahanya, modal digunakan untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, sedangkan bagi perusahaan atau bidang usaha maupun bisnis yang sudah berdiri lama, modal biasanya digunakan untuk dapat mengembangkan usaha maupun memperluas pangsa pasar dari bisnis dan usaha tersebut. Modal adalah salah satu faktor produksi yang menyumbang pada hasil produksi, hasil produksi dapat meningkat karena digunakannya alat-alat mesin produksi yang efisien, ketika hasil produksi meningkat maka pendapatan juga akan meningkat. Dalam proses produksi tidak ada perbedaan antara modal sendiri dengan modal pinjaman, yang masing-masing menyumbang langsung pada produksi. Menurut (Hariyanto, 2014) mengatakan Kekurangan dana merupakan alasan klasik suatu pemberdayaan tidak dapat berjalan dengan baik serta belum memenuhi kebutuhan nelayan. Berdasarkan fakta lapangan dana yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Prigi belum dapat mengatasi kemiskinan nelayan. Hal ini disinyalir bahwa setiap program pemberdayaan masyarakat nelayan yang menerima bantuan adalah sebagian orang tertentu, sehingga program yang telah di gulirkan hanya dinikmati oleh sebagian nelayan. Nelayan yang belum mendapat bantuan tetap pada posisi tak

berdaya. Anggaran merupakan salah satu pendorong pemberdayaan dapat berjalan dengan baik. Kekurangan dana akan menjadi penghambat dalam pemberdayaan karena bantuan yang diberikan tidak dapat menjangkau semua nelayan, dengan keadaan seperti itu kemiskinan tetap saja berlangsung, seharusnya dana yang di anggarkan bisa dinikmati semua nelayan. Selanjutnya (Adilah et al., 2022) mengatakan Dengan adanya pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap pada nelayan Kabupaten Lamongan melalui pengembangan sumberdaya manusia, bantuan pemodal, bantuan alat tangkap perikanan dampaknya sangat dirasakan oleh nelayan, memberikan dampak yang baik karena dengan adanya pengembangan tersebut pendapatan nelayan bertambah, meningkatnya pendapatan pelaku industri pengolah hasil perikanan, dan meningkatnya hubungan jaringan kemitraan.

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemampuan masyarakat usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Pelatihan adalah serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seseorang, sedangkan pengembangan (*development*) diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi. Dinas perikanan telah melakukan pendampingan terhadap nelayan yang menerima bantuan, baik dari bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama yang mendapat bantuan langsung berupa sarana dan prasarana untuk menangkap ikan. Pemerintah melakukan pendampingan dengan cara membimbing nelayan dari segi teknis, pembinaan dari segi manajemen, serta dari segi keuangan contohnya dengan pembuatan buku laporan atau kas agar pendapatan mereka bisa lebih terorganisir. Tujuan dari program pembinaan dan pelatihan perikanan adalah untuk meningkatkan produksi ikan yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan ketersediaan ikan yang mudah, berkualitas dan harga yang terjangkau, membuka kesempatan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta daerah, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan sumber daya manusia perikanan terutama Kelompok Nelayan, serta menyediakan sarana dan prasarana penangkapan ikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Windasai et al., 2021), dalam kesimpulan penelitiannya bahwa sumber daya manusia sangat diperlukan dalam rangka dalam memamfaatkan peralatan penangkapan ikan, untuk bisa memaksimalkan hasil tangkapan untuk meningkatkan pendapatnya.

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan

pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Pemasaran produksi perikanan khususnya masyarakat nelayan daerah lampu satu yang memproduksi ikan agar mengusahakan bagaimana menciptakan produksi ikan yang berkualitas atau sesuai dengan yang di ajarkan penyuluh khususnya dari Dinas Perikanan itu sendiri. Perlu diingat bahwa konsumen adalah orang yang berkuasa untuk memutuskan untuk membeli atau tidak suatu produksi. Jadi, konsumen adalah bagian dari pasar, dan juga bisa memberikan keuntungan yang lebih apabila produksi yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen. Menurut (Basu & Irawan, 2008) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain : kondisi dan kemampuan pedagang, kondisi pasar , modal, kondisi organisasi perusahaan, faktor lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemasaran hasil Perikanan sebagai salah satu bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke berfungsi meningkatkan mutu hasil perikanan dan mengembangkan usaha pengolahan serta pemasaran hasil perikanan, terutama yang dilakukan oleh pelaku usaha skala mikro hingga skala makro melalui peningkatan sarana dan prasarana. Menurut (Adilah et al., 2022) Dengan adanya pengembangan ekonomi lokal melalui sektor perikanan tangkap pada nelayan Kabupaten Lamongan melalui pengembangan sumberdaya manusia, bantuan pemodal, bantuan alat tangkap perikanan dampaknya sangat dirasakan oleh nelayan, memberikan dampak yang baik karena dengan adanya pengembangan tersebut pendapatan nelayan bertambah, meningkatnya pendapatan pelaku industri pengolah hasil perikanan, dan meningkatnya hubungan jaringan kemitraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa peran Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dalam Meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di lampu satu kelurahan samkai belum terlaksana dengan baik serta masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat nelayan. Oleh karena itu, Untuk meningkatkan Produktivitas tenaga kerja yang memerlukan banyak tenaga kerja dan harus memiliki keterampilan guna memperoleh penghasilan yang meningkat hal ini menjadi kendala karena kurang efektifnya pembinaan dari pemerintah juga masyarakat nelayan yang kurang responsif terhadap pembinaan yang dilakukan pemerintah . Modal usaha sendiri di sumbangkan pada produksi agar penghasilan ikut meningkat. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan di tabung dan di investasikan kembali dengan tujuan memperbesar pengeluaran dan pendapatan dikemudian hari,.hal ini menjadi kendala karena modal usaha masyarakat nelayan terbatas dan anggaran alokasi dan untuk pemberdayaan nelayan yang masih minim . Teknik penangkapan masih menggunakan peralatan tradisional serta ada juga menggunakan Teknologi modern, seperti

kapal motor hingga ke teknologi citra satelit yang dapat di gunakan sebagai alat bantu seperti GPS dan alat bantu kapal lainnya, menyebabkan masyarakat nelayan belum semuanya bisa mendapatkan dan menggunakan peralatan tersebut karena keterbatasan sarana perasarana. Dalam hal pendampingan dengan cara membimbing nelayan dari segi teknis, pembinaan dari segi manajemen pemasaran dan, dari segi keuangan; Memberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan produksi ikan yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan ketersediaan ikan yang mudah, berkualitas dan harga yang terjangkau, membuka kesempatan usaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah, meningkatkan sumber daya manusia perikanan terutama Kelompok Nelayan, serta menyediakan sarana dan prasarana penangkapan ikan, masih kurang intensifnya pembinaan yang dilakukan pemerintah dan kurang responsifnya masyarakat nelayan dalam pembinan.

Untuk meningkatkan pendapatan nelayan pihak pemerintah, maupun swasta harus bersinergi membantu nelayan dalam hal permodalan dan teknologi baik itu kualitas maupun kuantitasnya. Masyarakat nelayan sebaiknya membentuk kelompok nelayan ataupun koperasi yang dapat membantu dalam memperoleh pinjaman modal, membantu pemasaran hasil tangkap, dan tukar ilmu serta informasi antar nelayan agar nelayan dapat lebih mandiri. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kebijakan yang pro terhadap masyarakat nelayan yang ada di daerah pesisir pantai Lampu Satu Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke, untuk pemberdayaan masyarakat nelayan. Perlunya program khusus dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang berkualitas agar kualitas hidup juga dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Adilah, N., Cikusin, Y., & Hayat. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Perikanan Tangkap. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(2), 33–43.

Arifin, B., Septiawan, A. W., Corpatty, J. E. M., Dinaulik, J. E., Junaedy, A., & Nurdin, N. L. (2015). Perencanaan Pembangunan Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kab. Merauke, Papua.

Basu, S., & Irawan. (2008). Manajemen Pemasaran Modern. Liberty, Yogyakarta.

Hariyanto, S. (2014). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, 2(1).

Ramdayanti, E., Argenti, G., & Marsingga, P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk)*, Vi(02).

Rostin. (2016). The Effect Of Economic Empowerment Of The Coastal Communities And Social Capital On Coastal Community Welfare. *The International Journal Of Engineering And Sciences (Ijes)*, 5(2).

Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Pt Raja Grafindo Persada.

Sriyono, Dewi, S. R., & Handayani, P. (2021). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharobah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 81. <Https://Doi.Org/10.29040/Jiei.V7i1.1697>

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods). *Alfabeta*. Bandung.

Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Kepulauan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(03), 793–804.